

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Idul Rishan, *Teori & Hukum KonstitusiI*, Ctk. Pertama, Sinar Grafitika, Jakarta Timur, 2024.
- Safi', *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia*, Ctk. Pertama, Scopinda Media Pustaka, Surabaya, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi (Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi)*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2020.
- Syamsuddin Haris, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Ctk. Pertama, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat, 2017.
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial ReviewI*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

JURNAL

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 32, 2025.
- Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, No. 3, Vol. 3, 2025.
- Unizar Law Review*, No. 2, Vol. 7, 2024.
- Jurnal Hasil Penelitian*, No. 4, Vol. 18, 2023.
- Jurnal Relasi Publik*, No. 4, Vol. 1, 2023.
- Jurnal Riset Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 3, 2023.
- Jurnal Pendidikan, Seni, Dains, dan Sosial Humanioral*, No. 2, Vol. 1, 2023.
- Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 19, 2022.
- Lex Renaissance*, No. 4, Vol. 7, 2022.
- Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, No. 1, Vol. 5, 2021.

Jurnal Konstitusional, No. 4, Vol. 18, 2021.

Jurnal Neo Societal, No. 4, Vol. 6, 2021.

Jurnal Syariah dan Hukum Islam, No. 1, Vol. 6, 2021.

Jurnal Hukum Progresif, No. 1, Vol. 8, 2020.

Jurnal Konstitusi, No. 4, Vol. 17, 2020.

Jurnal Media Hukum, No. 1, Vol. 21, 2014.

Jurnal Konstitusi, No. 3, Vol. 10, 2013.

Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 15, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

PUTUSAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-XXII/2024.

BERITA

Efraim Jordi, *Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-1t63036436952ae>, diakses tanggal 14 Juli 2025.

Hendrik Khoirul, *Kepala Daerah Diwawancara Kembali Dipilih Lewat DPRD, Begini Sejarah Pilkada Digelar Secara Langsung*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/politik/kepala-daerah-diwawancara-kembali-dipilih-lewat-dprd-begini-sejarah-pilkada-digelar-secara-langsung-1181937>, diakses tanggal 12 Juli 2025.

_____, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Berpotensi Langgar Aturan*, terdapat dalam <https://www.kompas.id/artikel/perpanjangan-masa->

[jabatan-kepala-daerah-berpotensi-langgar-aturan/amp](#), diakses tanggal 12 Juli 2025.

Sri Pujianti, *Sejumlah Kepala Daerah Persoalkan Kompleksitas Pilkada Serentak*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20005&menu=2>, diakses tanggal 25 April 2025.

Topan Yuniarto, *Mahkamah Konstitusi*, terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/lembaga/2021/03/03/mahkamah-agung?open_from=Search_Result_Page, diakses tanggal 14 Juli 2025.

Tubagus Achmad, *Pertahankan Masa Jabatan Lima Tahun, Bupati Malang Sanusi Bersama 270 Kepala Daerah Gugat MK*, terdapat dalam <https://www.malangtimes.com/baca/305212/20240203/124100/pertahankan-masa-jabatan-lima-tahun-bupati-malang-sanusi-bersama-270-kepala-daerah-gugat-mk>, diakses tanggal 8 Mei 2025.

Utami Argawati, *MK, Penafsiran Konstitusi yang Penafsirannya Berkekuatan Hukum Mengikat*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/berita/mk,-penafsir-konstitusi-yang-penafsirannya-berkekuatan-hukum-mengikat--21528>, diakses tanggal 14 Juli 2025.

Widihia Arum, *Sejarah Pilkada Serentak di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, terdapat dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-7450039/sejarah-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>, diakses tanggal 12 Juli 2025.

